

Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan Di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

Yagus¹, Achmad Djumlani², Syahrani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan, untuk mengetahui bagaimana manfaat pengembangan Minapolitan bagi petani, untuk mengetahui faktor pendukung dari pengembangan Minapolitan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan cukup besar dengan pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan program diantaranya pemberian bantuan percontohan kolam setiap tahunnya, bantuan bibit ikan kepada petani, bantuan pemberian dana hibah kepada petani, pembukaan akses jalan menuju Minapolitan, dan program kebijakan lainnya untuk mendukung dan mendorong para petani dan para minabisnis meningkatkan produksi dan pembudidayaan ikan menjadi lebih produktif guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Kegiatan pengembangan Minapolitan di Desa Malinau Seberang membawa manfaat dan memberi kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Bahwa perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan Minapolitan yang berada di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan program membuka akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai dan representatif, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan air bersih, tersedianya industri pengolahan perikanan, dan kegiatan lainnya guna mendukung pengembangan usaha Minapolitan. Masalah dan hambatan dalam pengembangan Minapolitan yang dihadapi petani ikan diantaranya; masalah SDM petani ikan yang masih rendah, harga pakan ikan yang mahal, kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, harga bibit ikan yang mahal, masalah pemasaran hasil perikanan yang masih kalah bersaing dengan harga ikan yang berasal dari luar daerah karena harga jual yang lebih murah, serta anggaran bantuan kepada petani ikan yang kecil.

Kata Kunci : Implementasi, Minapolitan, Petani Ikan, Desa Malinau

Pendahuluan

Pengelolaan ruang perikanan budidaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan dan usaha-usaha berbasis perikanan lainnya dalam skala nasional. Sedangkan pengelolaan ruang kawasan sentra produksi perikanan nasional dan daerah merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang bagi

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

peruntukkan perikanan secara umum. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Hal ini merupakan potensi sumber daya terpendam yang sangat besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan dan keluarganya. Sebagian besar kegiatan perikanan di Indonesia tidak memiliki dasar teori maupun ilmu pengetahuan yang benar tentang dunia perikanan. Untuk mengajarkan para pembudidaya dan nelayan tentang dunia perikanan maka dibutuhkan proses penyuluhan yang baik. Dengan adanya penyuluhan maka masyarakat perikanan dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pekerjaan mereka yang berhubungan dengan dunia perikanan. Dalam kegiatan usaha perikanan, terlibat tiga unsur utama yaitu komoditas perikanan, lingkungan dan manusia sebagai pengelolanya.

Untuk wilayah Kabupaten Malinau sendiri kesenjangan kebutuhan ikan konsumsi terhadap produk ikan tawar yang dihasilkan oleh Kabupaten Malinau masih menjadi persoalan. Kabupaten Malinau dengan demikian masih mengalami kelebihan permintaan, untuk mengatasi kesenjangan ini pasar-pasar di kabupaten Malinau ini mengandalkan pasokan ikan dari daerah lain. Oleh sebab itu pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Malinau ini bukan hanya penting dan strategis untuk menyeimbangkan pasar pasokan dan permintaan pasar domestik perikanan, melainkan yang lebih penting lagi adalah meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Malinau tersebut sehingga bisa dirasakan diseluruh masyarakat Kabupaten Malinau. Kawasan minapolitan di Kabupaten Malinau dalam jangka panjang kelak diharapkan menjadi perikanan sebagai sektor basis dan sektor inti bagi pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Malinau sekaligus mampu memberikan efek positif keterkaitan untuk para petani ikan. Harapan tinggi terhadap terwujudnya manfaat kawasan minapolitan di Kabupaten Malinau secara teoritis sebetulnya tidak berlebihan, mengingat apa yang akan direncanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan adalah pengembangan minapolitan secara normatif.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (1997:64) bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the mean for carrying out* (menyediakan sarana untuk menyediakan sesuatu) *to give practical effect* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Jika pandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Menurut Carl. J Friedrich (dalam Budi Winarno, 2002:16), kebijakan sebagai suatu tindakan arah yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu tujuan atau sasaran atau suatu maksud tertentu. Menurut Thomas R.Dye (Dalam badjari dan Yuwono,2000:8)Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk mencapai maksud,tujuandan sasaran tertentu.

Implementasi kebijakan menurut kamus Webster dalam Wahab (2000:64) menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika kita lihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden.Menurut Van Horn dalam Wahab (2000:65) dikemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian Minapolitan

Minapolitan Secara harafiah dapat diartikan sebagai kota ikan (mina =ikan; polis=kota). Dengan demikian minapolitan berkaitan dengan pengembangan suatu kota atau kawasan yang memiliki potensi sumber daya ikan yang menonjol untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyatakan bahwa minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2010 menjelaskan Minapolitan adalah sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Di dalam pengembangan Minapolitan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menetapkan kawasan-kawasan yang potensial dan prospektif yang menjadi Kawasan Minapolitan.

Didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, disebutkan bahwa yang dimaksud Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pengertian Minapolitan adalah pengembangan suatu daerah kawasan yang memiliki potensi sumber daya ikan yang menonjol pada suatu kawasan atau daerah tertentu yang dapat dikembangkan potensinya untuk usaha petani atau nelayan maupun dikembangkan sebagai produk unggulan daerah dalam mengembangkan usaha perikanan.

Kawasan Minapolitan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. Menyebutkan Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Program Minapolitan merupakan program rumpun Agropolitan yang secara fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan baik pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air tawar, termasuk produk-produk olahan dan jasa lingkungan perairan dalam suatu *cluster* kawasan yang terdiri dari beberapa desa atau kecamatan, sebagai upaya mewujudkan kesejajaran antara kota dengan desa.

Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentrasentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa perumahan dan kegiatan terkait lainnya. Kawasan Minapolitan berdasarkan turunan kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan di Kawasan Agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan Minapolitan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah dalam sektor perikanan serta mampu mencukupi kebutuhan ikan dalam skala regional dan nasional.

Dari beberapa penjelasan mengenai kawasan minapolitan penulis menyimpulkan bahwa Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung dalam mengembangkan usaha perikanan untuk dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat dalam membangun ekonomi daerah..

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti mengenai Implementasi kebijakan pengembangan minapolitan bagi petani ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.
2. Manfaat pengembangan Minapolitan bagi petani ikan
3. Faktor pendukung dari pengembangan Minapolitan bagi petani ikan
4. Masalah dan hambatan dalam pengembangan Minapolitan bagi petani ikan

Teknik Analisis data

Adapun analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Miles Dan Huberman (2000:16) mengemukakan bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

1. Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang di kumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Penyederhanaan data (*data reduction*) adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang di kumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah di sortir atau di periksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat di buktikan.
3. Penyajian data (*Data display*) yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu sesuatu yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Sehingga dapat di simpulkan empat hal utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling berkaitan baik pada saat sebelum, selama, maupun sesudah pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

Dari hasil wawancara penulis dengan responden lainnya serta berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan penulis menyimpulkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan Minapolitan cukup besar dengan pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan program diantaranya pemberian bantuan percetakan kolam setiap tahunnya, bantuan bibit ikan kepada petani, bantuan pemberian dana hibah kepada petani, pembukaan akses jalan

menuju Minapolitan, dan program kebijakan lainnya untuk mendukung dan mendorong para petani dan para minabisnis meningkatkan produksi dan pembudidayaan ikan menjadi lebih produktif guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Malinau berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap potensi pengembangan perikanan air tawar dan lokasi yang strategis untuk dikembangkan budidaya perikanan air tawar. Sejarah pengembangan minapolitan di Kabupaten Malinau berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 532/k.230/2008 tentang penetapan kawasan Kaliamok sebagai Kawasan Minapolitan. Dengan keluarnya keputusan Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti kepada instansi vertikal, instansi Dinas terkait hingga saat ini kita bisa melihat langsung dilapangan bagaimana perkembangan Minapolitan yang semakin bertambah jumlah percetakan kolam, minat petani yang semakin antusias serta hasil produksi dan budidaya perikanan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pendefinisian kawasan Minapolitan dapat dipahami sebagai “suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya”. (Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12/MEN/2010 tentang Minapolitan). Dengan demikian dapat ditarik kata kunci dari kawasan Minapolitan adalah:

- a) Bagian wilayah dengan fungsi utama kegiatan ekonomi (tidak harus identik dengan kota ataupun perkotaan)
- b) Adanya sentra produksi ikan
- c) Adanya sentra pengolahan ikan
- d) Adanya sentra pemasaran ikan

Dalam kawasan minapolitan yang berada di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara. Sektor budidaya ikan air tawar dan udang sungai dijadikan sebagai industri inti dalam sistem klaster. Dalam pengusahaan budidaya ikan air tawar dan udang sungai desa Malinau seberang dan sekitarnya mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan sebagai pusat pengembangan utama kawasan minapolitan ataupun minabisnis dari aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial dan budaya. Strategi pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar (Market driven) yang dapat menembus batas kawasan minapolitan, bahkan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Negara untuk mencapai pasar global melalui persaingan yang ketat. Pengembangan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan kondisi sosial ekonomi budaya daerah. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktifitas komoditas perikanan tetapi juga pada pengembangan usaha dengan sistem minabisnis hanya yang

- mendukung usaha minabisnis yaitu minabisnis hulu, minabisnis hilir (pemasaran, pengolahan hasil) serta industri jasa dan pelayanan;
2. Pengembangan usaha dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan yang diperlukan seperti jaringan jalan, irigasi transportasi, telekomunikasi, pasar, gudang, dan kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil perikanan ke pasar dengan efisien dengan resiko yang minimal;
 3. Reformasi regulasi yang berhubungan dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi daerah dan wilayah seperti dalam hal perizinan, bea masuk, peraturan dari pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang harus saling mendukung dan konsisten, sehingga menghilangkan regulasi yang saling menghambat.

Seperti diketahui bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang pada umumnya berada di daerah pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di daerah perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di daerah perkotaan. Bahkan hubungan ekonomi kota dan desa sering eksploitatif, sehingga ekonomi masyarakat di daerah pedesaan sulit berkembang. Hal ini lah yang menyebabkan disparitas antar wilayah terjadi.

Manfaat Pengembangan Minapolitan

Untuk mengetahui manfaat dari pengembangan minapolitan di daerah. Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Rona selaku Kabid Pertanian pada Dinas Pertanian dan perikanan dengan tujuan untuk mengetahui manfaat dan tujuan dari pengembangan minapolitan bagi petani (masyarakat) dan pemerintah dimana beliau mengatakan:Manfaat dan tujuan dari pengembangan minapolitan bagi masyarakat adalah usaha minapolitan dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang dapat menambah penghasilan masyarakat guna untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan nilai ekonomi masyarakat karena usaha minapolitan memiliki prospek usaha cerah kedepannya jika usaha budidaya perikanan ini dapat ditekuni. Tujuan kedepannya bagi pemerintah daerah melalui pengembangan minapolitan yaitu kedepannya dalam jangka panjang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu komoditi unggulan daerah dalam usaha perikanan air tawar dan sebagai sumber pendapatan daerah (PAD) untuk itu produksi, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan perlu ditingkatkan agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Malinau maupun daerah sekitarnya. Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung kepada petani yang memiliki usaha perikanan di kawasan Minapolitan apakah usaha Minapolitan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat dan manfaat lainnya. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Muhamad Selaku Petani Ikan di

Minapolitan dimana beliau mengatakan: Saya sebagai petani ikan secara langsung dapat merasakan manfaat dari ada usaha pengembangan Minapolitan. Dimana usaha perikanan ini dapat dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga, melalui usaha perikanan ini saya secara pribadi dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan keperluan ekonomi lainnya. Disamping itu banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan melalui kegiatan pemeliharaan dan budidaya perikanan kita mengerti dan memahami teknik budidaya perikanan yang baik mulai dari proses pembibitan hingga proses produksi atau masa panen ikan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden dan hasil wawancara kepada responden lainnya serta berdasarkan pengamatan langsung dilapangan penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pengembangan Minapolitan di Desa Malinau Seberang membawa manfaat dan memberi kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Artinya secara langsung petani dapat merasakan manfaat dari pengembangan Minapolitan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan kedepannya usaha budidaya perikanan memiliki prospek yang cerah bagi bisnis atau usaha dibidang perikanan. Kedepannya bagi pemerintah Kabupaten Malinau diharapkan usaha Minapolitan dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan usaha perikanan air tawar dan sumber pendapatan daerah (PAD) dan memberikan nilai tambahan bagi usaha daerah. Program Pengembangan Minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, dan berkelanjutan. Guna mendukung pendekatan Minapolitan yang mantap dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat secara nasional, diperlukan adanya rumusan yang lebih komprehensif mengenai konsep Minapolitan, kriteria, mekanisme koordinasi dan indikator-indikator yang lebih terukur. Konsep Minapolitan dapat didefinisikan sebagai kota perikanan dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan berprinsip integrasi, efisien, kualitas, akselerasi tinggi.

Dengan konsep Minapolitan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada di daerah perkotaan perlu pula dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi. Sebagai sentra produksi, daerah pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana daerah perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai. Konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat

dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi guna memajukan minapolitan di daerah.

Faktor pendukung dari pengembangan Minapolitan

Berdasarkan Keputusan Bupati Malinau No. 532/k.230/2008 bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malinau berkewajiban untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan Minapolitan di Kabupaten Malinau. Beberapa program kebijakan dari pemerintah daerah guna mendukung pengembangan Minapolitan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara antara lain; akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai dan representatif, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan air bersih, tersedianya industri pengolahan perikanan, dan kegiatan lainnya guna mendukung pengembangan usaha Minapolitan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden lainnya serta berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan penulis menyimpulkan bahwa perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan Minapolitan yang berada di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan program membuka akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai dan representatif, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan air bersih, tersedianya industri pengolahan perikanan, dan kegiatan lainnya guna mendukung pengembangan usaha Minapolitan. Dalam Keputusan Bupati Malinau No. 532/k.230/2008 bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malinau berkewajiban untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan Minapolitan di Kabupaten Malinau. Kewajiban pemerintah daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan petunjuk teknis operasional lapangan
- b. Memberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah
- c. Mengambil tindakan-tindakan sebagaimana mestinya dalam rangka pengembangan minapolitan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dari pengembangan minapolitan.

Kita bisa melihat secara langsung bagaimana perhatian pemerintah daerah kepada pengembangan Minapolitan di daerah. Perhatian pemerintah daerah melalui Dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, perkebunan Kabupaten Malinau menyusun program untuk mendukung usaha pengembangan Minapolitan diantaranya dengan membuka akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai dan representatif, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan air bersih, tersedianya industri pengolahan perikanan, dan kegiatan lainnya guna mendukung pengembangan usaha Minapolitan.

Masalah dan hambatan dalam pengembangan Minapolitan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden lainnya serta berdasarkan

penelitian langsung yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa beberapa masalah dan hambatan dalam pengembangan usaha minapolitan diantaranya; masalah SDM petani ikan yang masih rendah, harga pakan ikan yang mahal, kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, harga bibit ikan yang mahal, masalah pemasaran hasil perikanan yang masih kalah bersaing dengan harga ikan yang berasal dari luar daerah karena harga jual yang lebih murah, serta anggaran bantuan kepada petani ikan yang kecil. Hal tersebut berpengaruh pada semangat kerja dan motivasi petani ikan dalam memelihara dan membudidayakan perikanan. Perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan lahan/potensi yang ada dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penataan ruang perikanan di pedesaan. Pengelolaan ruang perikanan budidaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan dan usaha-usaha berbasis perikanan lainnya dalam skala nasional. Sedangkan pengelolaan ruang kawasan sentra produksi perikanan nasional dan daerah merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang bagi peruntukkan perikanan secara umum.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang diuraikan penulis pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Implementasi dari kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan Minapolitan cukup besar dengan pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan program diantaranya pemberian bantuan percetakan kolam setiap tahunnya, bantuan bibit ikan kepada petani, bantuan pemberian dana hibah kepada petani, pembukaan akses jalan menuju Minapolitan, dan program kebijakan lainnya untuk mendukung dan mendorong para petani dan para minabisnis meningkatkan produksi dan pembudidayaan ikan menjadi lebih produktif guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Manfaat pengembangan Minapolitan bagi Petani Ikan. Kegiatan pengembangan Minapolitan di Desa Malinau Seberang membawa manfaat dan memberi kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Artinya secara langsung petani dapat merasakan manfaat dari pengembangan Minapolitan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan kedepannya usaha budidaya perikanan memiliki prospek yang cerah bagi bisnis atau usaha dibidang perikanan. Kedepannya bagi pemerintah Kabupaten Malinau diharapkan usaha Minapolitan dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan usaha perikanan air tawar dan sumber pendapatan daerah (PAD) dan memberikan nilai tambahan bagi usaha daerah. Faktor pendukung dari pengembangan Minapolitan bagi petani ikan. Bahwa perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan Minapolitan yang berada di Desa Malinau Seberang

Kecamatan Malinau Utara cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan program membuka akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai dan representatif, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan air bersih, tersedianya industri pengolahan perikanan, dan kegiatan lainnya guna mendukung pengembangan usaha Minapolitan. Masalah dan hambatan dalam pengembangan Minapolitan yang dihadapi petani ikan diantaranya; masalah adalah harga jual ikan yang masih rendah, harga pakan ikan yang mahal, kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, harga bibit ikan yang mahal, masalah pemasaran hasil perikanan yang masih kalah bersaing dengan harga ikan yang berasal dari luar daerah karena harga jual yang lebih murah, serta anggaran bantuan kepada petani ikan yang kecil. Hal tersebut berpengaruh pada semangat kerja dan motivasi petani ikan dalam memelihara dan membudidayakan perikanan.

Saran-saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Kepada Dinas Pertanian, perikanan Kabupaten Malinau agar program kebijakan yang lebih pro mendukung pengembangan usaha petani Minapolitan ditingkatkan, dan program yang ada hendaknya melalui penelitian dan pengkajian secara komperenhensif mengenai kebutuhan petani dan pelaksanaan dari program agar dapat dikawal langsung dilapangan agar program pemerintah tersebut dapat tepat sasaran berdasarkan kebutuhan dari petani ikan dalam mengembangkan dan membudidaya perikanan didaerah. Pengelolaan pembudidaya perikanan Minapolitan agar fasilitas sarana dan prasarana pendukung dapat dilengkapi seperti akses jalan yang memadai, listrik dan fasilitas pendukung lainnya guna mewujudkan keinginan dari pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan minapolitan menjadi salah satu usaha unggulan daerah dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah (PAD). Perlu dilakukan penyuluhan dan bimbingan teknis serta bantuan subsidi pakan ikan kepada petani ikan dalam rangka meningkatkan SDM petani dalam pengelolaan, pemeliharaan pembudidayaan perikanan agar dihasilkan produksi ikan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah hingga kedaerah luar Kabupaten Malinau. Diharapkan kepada masyarakat, agar memiliki kesadaran dan minat terhadap usaha minabisnis pengembangan budidaya perikanan dalam rangka menambah pendapatan dan dapat dijadikan sumber pendapatan ekonomi keluarga.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Abdul Wahab, Solichin 2000. *Analisis Kebijakan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, edisi kedua, bumi aksara Jakarta
- Abdurahmat Fathoni, 2006. *Organisai dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah(2011). *Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Gresik*
- Bustami, Marina (2010). *Minapolitan Tatapan dan Pelestarian Kawasan Konservasi*[Internet].
- Bintoro, 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*,LP3ES, Jakarta.
- Dunn,William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke dua. Gajah Mada University, Press Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus,1995, *Penelitian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Publik Yang Diselenggarakan Oleh Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta, 20 Mei 1995.*
- Islamy Irfan, 2003.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2010).*Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2010 tentang Minapolitan.*
- Miles B. Mathew. Huberman A. Micheal. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta.
- Moleong, MA Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya.
- Osborne, David and Gaebler Ted, 1997.*Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik*, penterjemah Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Pranarkha, AMW dan Prajoyo, Onny, S., 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*.CSIS. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002 *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Media Presindo.
- Walgito, Bimo. 1980. *Psikologi Sosial*, edisi revisi, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Widjaja A.W, 1995. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Clogpps Diponegoro University, Semarang.